

PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMP NEGERI INKLUSI KABUPATEN SIDOARJO

THE IMPLEMENTATION OF GUIDANCE AND COUNSELING IN CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN INCLUSIVE JUNIOR HIGH SCHOOL SIDOARJO

Moh. Joko Slamet

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya,

Email: (joko.unesa@gmail.com)

Dra. Titin Indah Pratiwi, M.Pd

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya,

Email: (prodi_bk_unesa@yahoo.com)

Abstrak

Perkembangan pesat di dunia pendidikan yang dilaksanakan pemerintah di tahun 2000 yaitu pendidikan inklusif yang merupakan pengembangan sebelumnya di tahun 1980 pendidikan integrasi yaitu pendidikan sekolah reguler yang menerima dan mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa melihat ketunaan/berkebutuhan khusus yaitu peserta didik dengan hambatan kesulitan belajar, tunagrahita, tuna daksa, hambatan emosional serta hambatan dalam aspek geografis dalam satu lingkup sekolah. Hal tersebut yang menjadikan daya tarik peneliti dari sudut Bimbingan dan konseling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan konseling pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri Inklusi kabupaten Sidoarjo yang berupa program dan layanan yang diberikan, pelaksanaan, faktor yang menghambat serta faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya yang menarik untuk diketahui. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling (BK) dan Guru Pendamping Khusus (GBK).

Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri Inklusi kabupaten Sidoarjo menggunakan pola 17 plus, program yang terdapat di dalamnya 6 bidang bimbingan, 9 kegiatan layanan dan 5 kegiatan pendukung. Sedangkan pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik berkebutuhan khusus yang disebabkan oleh lingkungan sekitar baik sekolah, masyarakat dan keluarga pelaksanaan bimbingan konseling dilaksanakan guru BK di bantu oleh GBK. Adanya hambatan dan faktor pendukung dalam pemberian layanan

Kata Kunci: Layanan, program, bimbingan konseling, sekolah inklusif

Abstract

The rapid development in the world of education launched by the government in 2000 that inclusive education is the development earlier in 1980 integrated education: education regular schools that receive and accommodate all learners regardless of disability / special needs that learners with barriers to learning disabilities, mental retardation, disabled, emotional obstacles and barriers in the geographical aspects in the scope of the school. This is what makes the appeal of researchers from the point of guidance and counseling. This study aims to determine and describe the implementation of the counseling on learners with special needs in inclusive junior high school of Sidoarjo in the form of programs and services provided, implementation, as well as factors that hinder the factor support in its implementation, which is interesting to note. Respondents in this research was the headmaster, counselor (BK) and specially teacher (GBK).

The results of this analysis, implementation of guidance and counseling to learners with special needs in inclusive junior high school of Sidoarjo using 17 patterns plus, program contained therein 6 field guidance, 9 service activities and 5 supporting activities. While there are implementation problems faced by learners with special needs caused by the environment around good schools, communities and families implementation of guidance and counseling conducted counselor assisting by specially teacher. Barriers and supporting factors in service delivery.

Keywords: services, programs, guidance and counseling, inclusive schools.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi berkebutuhan khusus. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa negara menjamin sepenuhnya pendidikan bagi setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu. Sebagaimana tersurat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya dinyatakan pada pasal 2 bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini diatur pula pada Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 2 menyebutkan bahwa pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Salah satu upaya mewujudkan pendidikan yang tidak diskriminatif bagi peserta didik adalah dengan menyelenggarakan pendidikan tanpa membedakan kecerdasan dan jenis ketunaan yang disandang peserta didik yang dikemas dalam pendidikan khusus. Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan kelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa dalam bentuk sekolah inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sebagai penjabar, dalam pasal 32 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyuratkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik dengan tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pemerintah dalam meningkatkan mutu dalam menyelenggarakan pendidikan tidak lepas dari berbagai layanan yang di berikan terhadap peserta didik, salah satu layanan tersebut yaitu layanan pendidikan dengan sistem integrasi. Jenis layanan ini memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk belajar secara bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum. Sistem pendidikan integrasi disebut juga dengan sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Anak berkebutuhan khusus belajar secara bersama-sama dengan anak normal di sekolah reguler. Di Indonesia

telah dikembangkan sistem pendidikan integrasi pada tahun 1980, namun kurang berkembang (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, 2011). Baru pada tahun 2000 dikembangkan program pendidikan sebagai kelanjutan program pendidikan tersebut dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan istilah pendidikan inklusif.

Dalam konteks pendidikan, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak melihat hambatan dari sisi anak/peserta didik yang memiliki kelainan, namun sistem pendidikan yang harus mampu mengatasi hambatan tersebut. Karena itulah diperlukan modifikasi kurikulum, sarana dan prasarana, guru dan Konselor di sekolah serta komponen lain yang mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga mampu mengatasi setiap hambatan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan dan tercapainya pembelajaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan serta hambatan yang dihadapi oleh peserta didik maka peranan bimbingan dan konseling sangatlah membantu dalam pencapaian suatu pendidikan. Namun kenyataan di lapangan masih adanya anggapan polisi sekolah, tatib, presensi serta siswa masih punya anggapan bahwa yang datang ke ruang bimbingan konseling tentunya siswa yang bermasalah, akan tetapi di sisilain bimbingan konseling memiliki banyak pencapaian yang sangat membantu siswa.

Bimbingan konseling yang keberadaannya di nilai sangat positif serta banyak memberi sumbangsih dalam pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Dengan kata lain bimbingan konseling memiliki peran membantu siswa mampu mencari jalan keluar siswa yang mengalami kesulitan proses pembelajaran.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data yang berkenaan dengan suatu kasus. Pemilihan metode ini disebabkan adanya kesesuaian dengan pendapat Sukmadinata (2012) bahwa sesuatu dapat dijadikan sebagai suatu kasus biasanya karena adanya masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, akan tetapi tetap bisa di jadikan suatu kasus meskipun tidak ada masalah, namun karena memiliki suatu keunggulan, atau suatu keberhasilan yang dicapainya. Selain itu dikarenakan untuk mendapatkan gambaran proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah inklusif tidak bisa diukur dengan angka ataupun hanya disimpulkan melalui tabulasi numerik, namun diperlukan rincian secara deskriptif dan gamblang untuk menemukan tujuan penelitian. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2012:54) bahwa

“penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau”. dapat di simpulkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan fenomena apa adanya. Adapun yang menjadi suber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Konselor, Guru Pendamping Khusus (GPK)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi, serta menggunakan teknik triangulasi yang memadukan ketiga hal tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rancangan penelitian yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, telah dilakukan penelitian dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo, SMP Negeri 4 Sidoarjo dan SMP Negeri 6 Sidoarjo. Dalam bab ini akan peneliti paparkan data tentang a) gambaran umum sekolah, b) paparan data, bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Gambaran sekolah.

Lokasi penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah tiga sekolah selama penelitian berlangsung. Sekolah yang dipergunakan oleh peneliti yaitu di sekolah SMP Negeri Inklusi (SMP Negeri 2 Candi berlokasi di jalan Ngampel Sari No.64 Candi Sidoarjo, SMP Negeri 4 Sidoarjo berlokasi di jalan Suko Sidoarjo dan SMP Negeri 6 Sidoarjo, berlokasi di jalan Rangkah Lor No.1 Dusun Bluru Kidul) kabupaten Sidoarjo.

b) Paparan data.

Berikut ini data konselor, guru pendamping khusus (GPK) dan Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di tiga lokasi penelitian, yang disajikan dalam tabel berikut:

Nama Sekolah	Data	Jumlah
SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo	1. Guru BK	3 Orang
	2. GBK	3 Orang
	3. Siswa ABK	13 Siswa
SMP Negeri 4 Sidoarjo	1. Guru BK	3 Orang
	2. GBK	3 Orang
	3. Siswa ABK	27 Siswa
SMP Negeri 6 Sidoarjo	1. Guru BK	4 Orang
	2. GBK	1 Orang
	3. Siswa ABK	9 Orang

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti ditemukan jawaban dari pertanyaan yang di ajukan yaitu bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan di SMP Negeri Inklusi kabupaten Sidoarjo, untuk kegiatan layanan yang telah dilaksanakan adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, Penyusunan program mengacu pada musyawarah guru bimbingan konseling (MGBK), berdasarkan masukan guru dan wali kelas, orang tua siswa baik yang peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik pada umumnya, serta masukan dan pertimbangan kepala sekolah dan di susun guru BK disekolah masing-masing dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan keadaan masing-masing sekolah, administrasi BK berjalan dengan baik dan teratur, hambatan yang ada dapat terselesaikan, pembiayaan terkait pelaksanaan BK dapat langsung berhubungan dengan sekolah, sarana yang lengkap, Materi yang diberikan pada masing-masing sekolah berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa yang di sesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pelaksanaan layanan BK SMP Negeri Inklusi kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik, terprogram, terencana dan terstruktur. Semua tercantum dalam program baik sebelum maupun setelah pelaksanaan layanan pada siswa disekolah dan dipertanggung jawabkan pada kepala sekolah, Sedangkan program harian di sekolah dilaksanakan oleh guru BK dan pelaksanaan pemberian layanan melibatkan berbagai pihak diantaranya Guru BK, GPK, guru bidang studi, wali kelas, dan kepala sekolah seperti misalnya layanan Advokasi dapat diselenggarakan dengan kerjasama wali kelas, guru bidang studi, GBK, tatib maupun kepala sekolah.

Program Layanan bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo, SMP Negeri 4 Sidoarjo dan SMP Negeri 6 Sidoarjo terdiri dari layanan orientasi, layanan Informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan dan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, dan layanan penunjang yaitu penyelenggaraan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, alih tangan.

Pelaksanaan Program layanan, dalam hal ini dalam pelaksanaan layanan yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus telah terlaksana semua dari program layanan yang di canangkan sebab guru BK memiliki jam masuk kelas seta didukung kerjasama dengan pihak terkait.

Hambatan pada setiap sekolah sangatlah berbeda satu sama lain akan tetapi pada pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri Inklusi kabupaten sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik misal orang tua belum menerima terkait apa yang dialami pada anaknya, guru yang terkadang kurang sabar saat mengajar pdk saat dikelas.

Faktor yang mendukung dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling disekolah inklusi yaitu dukungan kepala sekolah dengan memfasilitasi terkait apa yang menjadi kebutuhan bimbingan konseling diantaranya meningkatkan kompetensi konselor dengan mengikuti seminar dan workshoop yang ada sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan konseling.

2. Saran

a. Bagi Guru BK

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman konselor dalam memberikan program bimbingan dan konseling yang tepat terhadap siswa yang mempunyai persepsi negatif terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling dan juga diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan konselor dalam melaksanakan penerapan strategi *cognitive restructuring* di sekolah untuk menurunkan persepsi negatif siswa terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lain yang ingin meneliti tentang *cognitive restructuring* untuk menurunkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Walgino, Bimo. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Andi
- Sukardi, Dewa Ketut dan Kusmawati, Desak Nila. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Johan, McLeod. 2008. *Pengantar Konseling*. Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Group

Mappiare, Andi. 2013. *Tipe-tipe Metode Riset Kualitatif*. Jl.Wida: Elang Mas

Dikti_____. 2013. *Modul Penelitian Pendidikan Inklusif*. Jakarta

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Penilaian dan Penelitian Bidang Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Aditya Media

Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari K. 2003. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theories and Medhods*. Fourth Edition. USA: Pearson Education Group

Sugiono. 2013, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 17. Bandung: Alfabeta

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional